

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Krisis ekonomi yang ada terjadi di negara kita ketika banyak perusahaan besar beberapa lama muncul di negara kita, ketika banyak perusahaan mengalami kegagalan dan kegiatan produksinya dihentikan, sektor UMKM sendiri jauh sudah terbukti jauh lebih betahan dalam menghadapi krisis perekonomian tersebut. Mengingat pengalaman yang telah terjadi di Indonesia selama krisis ekonomi, sekiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan terlebih dahulu pada UMKM, terlebih lagi dalam kegiatan usaha ini seringkali terabaikan oleh pemerintah dan halayak publik karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum dapat mampu berkompetisi dengan sektor usaha-usaha lain. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus yang lebih besar baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk berkembang lebih kompetitif. Sektor UMKM sangat terkait dengan pengembangan potensi produk unggulan sumber daya lokal yang mampu mengangkat kearifan lokal di suatu daerah maupun negaranya. UMKM dapat menjadi andalan di suatu daerah sebagai produk unggulan yang memiliki potensial serta produktif untuk dikembangkan di daerah tersebut sehingga dapat mendorong pengembangan pada perekonomian daerah. Daerah yang memiliki jaringan yang kuat pada UMKM-nya akan berhasil dalam persaingan industri di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu pemerintah daerah khususnya sudah seharusnya lebih memberi perhatian khusus karena UMKM merupakan aset daerah

Mengutip pada media Kontan.co.id mengatakan bahwa Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund*, memprediksi jumlah pelaku UMKM di Indonesia sendiri pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Dan Deputi Bidang Pembiayaan

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) menyatakan bahwa jumlah usaha mikro yang ada di Indonesia sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit, dan usaha besar 4.987 unit (keuangan.kontan.co.id, 8 Maret 2020).

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana sebagai pusat perekonomian, tentu persaingan terhadap barang dan jasa serta manusia dalam mencari pekerjaan akan semakin padat, tetapi program perekonomian berbasis kerakyatan yang memberdayakan masyarakat DKI Jakarta dalam memajukan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi tentunya memberikan harapan kepada masyarakat luas dalam mengembangkan usahanya, berikut penyebaran umkm menurut wilayah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 UMKM Tahun 2014, Provinsi Jakarta

No.	Prov./Kota/ Kabupaten	Jumlah Usaha			Total
	Provinsi DKI Jakarta	Mikro	Kecil	Menengah	
1.	Jakarta Selatan	24.620	148.584	31.933	205.137
2.	Jakarta Barat	17.176	146.527	31.425	195.128
3.	Jakarta Timur	18.307	147.440	31.784	197.495
4.	Jakarta Pusat	19.065	133.048	30.070	182.183
5.	Jakarta Utara	13.547	108.022	28.943	150.512
6.	Kep.Seribu	-	120	45	165
JUMLAH		92.715	683.741	154.164	930.620

Sumber : diskumdagdkj.jakarta.go.id, diolah

Dari data di atas dapat diketahui total jumlah UMKM yang ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut, usaha mikro terdapat 92.715 unit di wilayah Jakarta, usaha kecil sebanyak 683.741 unit usaha dan untuk usaha menengah yaitu

154.164 unit usaha. Dari sekian banyak jumlah unit UKM di Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta timur sendiri terdapat 197.495 pelaku UMKM

Di tahun 2017, Kredit Komersial Rakyat atau KUR menjadi salah satu tujuan rencana pemerintah, dengan target pendanaan sekitar Rp 110 triliun untuk membantu mengatasi efektifnya pembiayaan modal masing-masing UMKM. Namun realisasi rencana KUR tersebut hanya Rp 967 triliun, masih jauh dari target pemerintah yang diharapkan sebesar Rp 110 triliun (<https://bisnis.tempo.co>, diakses pada 11 Desember 2020). Alasan tidak tercapainya tujuan tersebut adalah bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam memberikan kredit, karena kurangnya informasi terkait status UMKM, terutama dalam hal pembiayaan komersial..

Di Indonesia sendiri, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM berkembang pesat, terlihat pada tahun 2018 total penduduk Indonesia sekitar 265 juta jiwa, seperti yang diprediksikan oleh data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Amerika Serikat. Dana Kependudukan Nasional yang mewakili 58,97 juta orang. Pemain UMKM (keuangan.kontan.co.id/, diakses 11 Desember 2020). Menurut Frisilia dan Wirajaya (2018), UMKM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pendapatan negara. UMKM termasuk dalam kategori usaha kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia

Pada tanggal 27 November 2016 IAI menerbitkan suatu kebijakan yang didapat mempermudah UMKM dalam melakukan akses mendapatkan modal usaha maupun kredit usaha dari bank, yaitu dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangannya yang sudah berlaku efektif dimulai dari 1 Januari 2018 lalu. SAK EMKM ini diluncurkan untuk khusus bagi UMKM dengan penyusunan yang lebih mudah dan praktis dari SAK yang mengatur suatu keuangan UMKM sebelumnya. Karena dalam SAK EMKM komponen laporan keuangannya itu sendiri hanya terdiri dari tiga bagian yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Semudah apapun penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan UMKM, pada praktiknya di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang tidak menggunakan informasi akuntansi dalam mengelola usahanya apalagi

melakukan suatu pencatatan sesuai SAK EMKM. Hal ini terjadi dikarenakan pelaku UMKM belum mengetahui adanya SAK EMKM (Janrosi, 2018) dan memandang bahwa pencatatan akuntansi yang berdasarkan SAK EMKM merupakan suatu monster “accounting is monster” dan yang dimana hal ini masih sangat tabu sehingga belum begitu penting untuk diterapkan. Selain itu belum adanya regulasi yang mewajibkan UMKM untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

SAK EMKM merupakan salah satu standar keuangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi atau tidak dapat memenuhi persyaratan akuntansi yang ditetapkan dalam SAK ETAP. Laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas UMKM sesuai dengan SAK EMKM antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan informasi tambahan pada laporan keuangan. Keluarnya SAK EMKM ini merupakan bentuk dukungan IAI sebagai organisasi akuntan profesional dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas serta mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Selain itu dengan adanya SAK EMKM diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi setiap UMKM untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan penghimpunan modal dari perbankan.

Berdasarkan dengan keberadaannya potensi dari UMKM sendiri di Indonesia adalah sebagai penunjang ekonomi negara. Adapun salah satu UMKM yang berkembang pesat di Indonesia yaitu kedai kopi, hal ini disebabkan minuman kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Mereka seolah ketinggalan zaman jika belum pernah menginjakkan kaki ke kedai kopi. Tren ini pun turut meningkatkan konsumsi kopi masyarakat Indonesia dan tercatat dari data International Coffee Organization (ICO) bahwa pertumbuhan rata-rata konsumsi kopi di Indonesia lebih besar daripada dunia pada umumnya (www.viva.co.id, diakses pada 19 Desember 2018).

Dalam penelitian Rachmanti, (2019) dan Yuliaryani (2019) tentang penerapan SAK EMKM pada UMKM, menunjukkan bahwa tidak adanya laporan keuangan yang dibuat pada UMKM tersebut. UMKM dianggap belum mampu

untuk mengimplementasikan standar akuntansi yang benar karena kurangnya informasi dan pengetahuan. Dari contoh penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis UMKM masih belum paham dan memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang penyusunan laporan keuangan yang benar. Padahal dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan memudahkan pelaku bisnis tersebut mengelola bisnisnya.

Salah satu contoh UMKM yang ada di Kota DKI Jakarta tepatnya di Jakarta Timur yaitu Kedai Syahdu yang dimiliki oleh bapak Awan Setiawan. Kedai Syahdu yang beralamatkan di Jalan Rawamangun Muka Timur Nomor 39, RT 03 / RW 12, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220. Kedai Syahdu adalah UMKM yang bergerak di bidang usaha jasa makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 2019. Omset perhari dari usaha ini berdasarkan informasi dari pemilik Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000. Alasan peneliti memilih Kedai Syahdu sebagai objek penelitian yaitu karena peneliti melihat dalam pengelolaan keuangan usaha, pemilik mengaku kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Dan pemilik usaha ini hanya membuat catatan penjualan dan pengeluaran kas saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA KEDAI SYAHDU, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu sejauh mana pengelola umkm menerapkan standar akuntansi terhadap laporan keuangan.

Dari pembahasan masalah diatas, maka secara spesifik perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada Kedai Syahdu dalam penyajian laporan keuangan ?

2. Bagaimana kendala yang muncul selama proses penyusunan laporan keuangan pada Kedai Syahdu berdasarkan SAK EMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Pada Kedai Syahdu, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah pada penyajian laporan keuangan di Kedai Syahdu, Jakarta Timur, DKI Jakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini diantaranya lain :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi pada Kedai Syahdu
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang membahas tentang penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi terkait dengan isi skripsi ini, baik sebagai bahan bacaan atau literature
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang

melakukan penelitian yang mengambil topik penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah

b. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku umkm untuk lebih memperhatikan pentingnya penyajian laporan keuangan pada UMKM dengan lebih baik.

c. Bagi Kedai Syahdu

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan standar akuntansi entitas kecil, mikro, dan menengah untuk pemilik maupun karyawan di Kedai Syahdu

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian oleh pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada sektor UMKM dalam mengelola keuangan khususnya mengenai akuntansi.